



Research Article

**Multicultural Education In The Perspective Of Azyumardi
Azra
(Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Azyumardi Azra)**

Mohamad Kholil
Universitas Darul Ma'arif, Indramayu, Indonesia
kahlilmohamad009@gmail.com

Rifqi
Universitas Darul Ma'arif, Indramayu, Indonesia
riefq816@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: September 2025
Accepted: November 2025

Revised : October 2025
Available online : December 2025

How to Cite: Mohamad Kholil, & Rifqi. (2025). Multicultural Education In The Perspective Of Azyumardi Azra (Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Azyumardi Azra). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(4), 225–241. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i4.180>

ABSTRAK

Fenomena keberagaman bangsa Indonesia dengan berbagai persoalan yang menyertainya merupakan hal menarik yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Adanya bermacam-macam agama dan aliran kepercayaan yang dianut masyarakat merupakan salah satu contoh dari sekian banyak aspek keberagaman tersebut. Pada satu titik tertentu kondisi ini sering memicu konflik dan kekerasan. Kasus konflik dan kekerasan antar etnis dan agama yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia merupakan potret masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat dalam menyikapi keberagaman tersebut. Maka kajian secara mendalam terkait pelaksanaan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama yang berdimensi multikulturalisme penting dilakukan. Ini dalam rangka mengatasi konflik-konflik horisontal bermotif sentimen agama atau kesukuan yang masih sering terjadi. Dalam kaitan ini, salah satu pemikir dan cendekiawan muslim yang pemikiran-pemikirannya cukup concern terhadap masalah ini adalah Azyumardi Azra. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif biografis. Adapun metode yang digunakan adalah content analisis untuk memahami dan menemukan substansi pemikiran pendidikan multikultural Azyumardi Azra yang tersebar dalam berbagai sumber literatur.

Hasil penelitian: (1) Dalam pandangan Azra, multikulturalisme bermuara pada satu kesadaran dan penegasan bahwa segala keberagaman dan perbedaan memiliki kedudukan yang sama di ruang publik. Multikulturalisme tidak hanya sebatas pemahaman akan adanya kemajemukan. Adapun nilai-nilai inti yang dikembangkan dalam multikulturalisme perspektif Azra adalah kesadaran akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*), dan demokrasi (*democratic values*); (2) Pendidikan multikultural menurut Azra adalah pendidikan untuk atau tentang keragaman masyarakat menuju terbentuknya kebersatuan di tengah kebhinnekaan. Konsep pendidikan multikultural Azra ini bertitik tolak dari realita keberagaman bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kata Kunci: *Pendidikan, Pendidikan Multikultural, Azyumardi Azra.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan pendidikan agama baik di lembaga-lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan keislaman banyak mendapat sorotan dan perhatian serius. Salah satu tokoh yang cukup concern melakukan kritik adalah Azyumardi Azra. Ia adalah seorang intelektual muslim yang konsisten menggagas pemikiran Islam progresif, pluralis dan inklusif, baik melalui mimbar-mimbar akademik, forum diskusi, seminar, konferensi, maupun dalam tulisan-tulisannya yang tertuang dalam bentuk makalah, artikel, jurnal, dan buku. Menurutnya, pendidikan agama sejauh ini belum mampu membentuk sikap keagamaan peserta didik yang mencerminkan perilaku keimanan dan ketaqwaan yang hakiki, juga kurang menumbuhkan sikap toleran dalam menyikapi berbagai perbedaan, termasuk perbedaan antar umat beragama (Idris, 2020).

Dalam berbagai tulisannya, ia banyak mengkritisi model pendidikan agama yang cenderung intoleran, sekaligus menghadirkan konsep pendidikan multikultural sebagai pendidikan yang perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan dalam memperkuat semangat nasionalisme. Lebih-lebih bangsa Indonesia akhir-akhir ini mengalami kecenderungan disorientasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi bangsa yang terdiri dari berbagai komunitas etnis yang hidup dalam berbagai tingkatan budaya atau peradaban yang berbeda-beda, telah memunculkan kesenjangan dan semakin menambah kompleksitas persoalan masyarakat (Azra, 2007, hlm. 13).

Sebagai seorang intelektual muslim yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, ia banyak merumuskan konsep pendidikan multikultural yang dipandang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang mengalami disorientasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan masyarakatnya berada pada tingkat budaya yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat ada yang hidup dalam taraf budaya pra-agraris, sebagian lagi ada dalam budaya agraris; beberapa kelompok ada yang hidup dalam budaya industri, dan beberapa kelompok lainnya telah berada dalam budaya teknologi informasi yang lebih canggih. Pada aspek inilah sebenarnya daya tarik pemikiran Azyumardi Azra tentang pendidikan multikultural. Ia merumuskan pendidikan multikultural untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika yang berbasis keragaman budaya masyarakat, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Saling pengertian dan saling

memahami antar berbagai entitas budaya yang beragam kiranya dapat ditumbuhkan melalui pendidikan semacam ini (Idris, 2020).

Tulisan ini akan mencoba mencari benang merah yang menyatukan pemikiran Azyumardi Azra tentang konsep pendidikan multikultural yang banyak tersebar dalam buku-buku, artikel, jurnal, dan makalah dalam berbagai diskusi dan seminar. Hasil dari kajian penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi bagi upaya pengembangan konsep pendidikan multikultural di lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan keislaman.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan, penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur ilmiah dari buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel, atau hasil-hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan (Nawawi, 2005, hlm. 133).

Dalam riset ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berupaya menghimpun data-data kualitatif untuk kemudian dilakukan kritik atau analisis terhadap data tersebut secara terarah, mendalam dan mendasar dalam rangka mengungkap topik kajian secara utuh dan menyeluruh (holistik) (Nawawi, 2005, hlm. 62).

Secara khusus, dalam riset ini penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif biografis. Pendekatan kualitatif biografis ini penulis gunakan untuk menggali data tentang background pemikiran Azyumardi Azra, yang meliputi: background keluarga, riwayat pendidikan, tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap pemikirannya, kolega intelektualnya dan karya-karyanya. Selain itu, dalam riset ini penulis juga menggunakan metode *analysis content* untuk memahami dan menemukan substansi pemikiran pendidikan multikultural Azyumardi Azra yang tersebar dalam berbagai sumber literatur (dikutip dalam Murdiyanto, 2020, hlm. 26-28).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Biografi Azyumardi Azra

Azyumardi dilahirkan di daerah Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 4 Maret 1955. Ia merupakan seorang intelektual muslim Indonesia. Pada tahun 1996 hingga 2006 Azyumardi pernah menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2010, ia mendapatkan titel *Commander of the Order of British Empire* dari Kerajaan Inggris yang menjadikannya sebagai orang pertama Indonesia dengan sebutan kehormatan 'Sir' (Wikipedia, diakses September 2025).

Karir pendidikan tinggi Azyumardi diawali pada tahun 1982 dengan menjadi mahasiswa program sarjana di Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta. Lalu pada tahun 1988 atas bantuan beasiswa Fullbright, ia berhasil mendapatkan gelar *Master of Art* (MA) dari Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University. Pada tahun 1989 ia kembali meraih beasiswa *Columbia President Fellowship* (dari kampus yang sama) pada Departemen Sejarah. Pada tahun 1992, ia memperoleh gelar *Master of Philosophy* (M.Phil) dari Departemen Sejarah, Columbia University, sekaligus *Doctor of Philosophy Degree* dengan menulis disertasi berjudul *The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Network of Middle Eastern and Malay-Indonesian 'Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Pada tahun 2004 disertasinya yang telah direvisi diterbitkan secara simultan di Canberra (Allen Unwin dan AAAS), Honolulu (Hawaii University Press), dan Leiden, Negeri Belanda (KITLV Press) (Azra, 1994; Azra, 1999).

Tahun 1993, ketika kembali ke Jakarta, Azyumardi membangun *Studia Islamika*, sebuah jurnal Indonesia untuk studi-studi keislaman, sekaligus menjadi pemimpin redaksinya. Kemudian pada tahun 1994-1995 ia melakukan lawatan *Southeast Asian Studies* pada *Oxford Centre for Islamic Studies*, Oxford University, Inggris, sekaligus menjadi dosen pada St. Anthony College. Di kawasan Asia, tepatnya pada tahun 1997, Azyumardi juga pernah menjadi profesor tamu pada Universitas Filipina dan Universitas Malaya, Malaysia. Pada tahun 1997-1999, Azyumardi menjadi anggota *Selection Committee of Southeast Asian Regional Exchange Program* (SEASREP) di bawah pengelolaan Toyota Foundation dan Japan Center, Tokyo, Jepang (Wikipedia, diakses September 2025).

Pada Desember 2006, ia menjabat Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelumnya, sejak tahun 1998 hingga akhir 2006 Azyumardi Azra merupakan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada 2006, posisinya sebagai Rektor resmi digantikan oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. Dalam rapat senat yang ia pimpin sendiri, Komarudin Hidayat terpilih menggantikannya dengan mengalahkan dua kandidat lainnya (Wikipedia, diakses September 2025).

Ia pernah pula menjadi Wartawan Panji Masyarakat (1979-1985); Dosen Fakultas Adab dan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (sejak 1992); Guru Besar Sejarah Fakultas Adab IAIN Jakarta, dan Pembantu Rektor I IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1998). Ia juga merupakan orang Asia Tenggara pertama yang diangkat sebagai Professor Fellow di Universitas Melbourne, Australia (2004-2009), dan anggota Dewan Penyantun (*Board of Trustees*) International Islamic University Islamabad Pakistan (2004-2009). Ia juga masih menjadi salah satu anggota Teman Serikat Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Wikipedia, diakses September 2025).

Azyumardi Azra dikenal sebagai Profesor ahli sejarah, sosial, dan intelektual

Islam. Ketika menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia melakukan terobosan besar terhadap institusinya tersebut. Pada Mei 2002, IAIN berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini merupakan kelanjutan dari ide Rektor terdahulu, Prof. Dr. Harun Nasution, yang menginginkan lulusan IAIN haruslah orang yang berpikiran rasional, modern, demokratis, dan toleran (Wikipedia, diakses September 2025).

Azyumardi menikah dengan Ipah Fariyah dan dikaruniai 4 anak, yakni Raushan Fikri Usada, Firman El-Amny Azra, Muhammad Subhan Azra, dan Emily Sakina Azra. Pada awalnya, Azyumardi tidak pernah berobsesi atau bercita-cita menggeluti studi keislaman. Sebab, ia lebih berniat memasuki bidang pendidikan umum di IKIP. Akan tetapi, karena desakan ayahnya, Azyumardi masuk ke IAIN sehingga ia kini dikenal sebagai tokoh intelektual Islam Indonesia. Ia lahir dari ayah bernama Azikar dan Ibu bernama Ramlah (Wikipedia, diakses September 2025).

Di antara buku-buku yang pernah ia tulis:

- a. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara* (1994)
- b. *Pergolakan Politik Islam* (1996)
- c. *Islam Reformis* (1999)
- d. *Konteks Berteologi di Indonesia* (1999)
- e. *Menuju Masyarakat Madani* (1999)
- f. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (1999)
- g. *Esei-esai Pendidikan Islam dan Cendekiawan Muslim* (1999)
- h. *Renaissance Islam di Asia Tenggara* (1999). Buku ini meraih penghargaan nasional sebagai buku terbaik untuk kategori ilmu-ilmu sosial dan humaniora pada tahun 1999.
- i. *Islam Substantif* (2000)
- j. *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah* (2002)
- k. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi* (2002)
- l. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara* (2002)
- m. *Menggapai Solidaritas: Tensi antara Demokrasi, Fundamentalisme, dan Humanisme* (2002)
- n. *Konflik Baru Antar-Peradaban: Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*
- o. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (2002)
- p. *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi* (2003)
- q. *Indonesia Bertaban, dari Mendirikan Negara Hingga Merayakan Demokrasi* (2020)

Diantara banyak penghargaan yang pernah diraih Azyumardi Azra adalah: *Penulis Paling Produktif* dari Penerbit Mizan, Bandung (2002); *Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE)* dari Kerajaan Britania Raya (2010); *Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture (SML)* dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2017); dan *Order of Rising Sun: Gold and Silver Star* dari Kaisar Jepang (2017)

(Wikipedia, diakses September 2025)..

2. Konsep Pendidikan Multikultural Azyumardi Azra

Secara bahasa, pendidikan multikultural terdiri dari dua kata, pendidikan dan multikultural. Makna pendidikan menurut Ainurrofiq sebagaimana dikutip Aly diartikan sebagai proses pengembangan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, pembuatan, dan cara-cara mendidik. Adapun makna multikultural secara umum berarti keragaman budaya. Dengan demikian, secara etimologi pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan yang memperhatikan aspek keberagaman peserta didik (Aly, 2012, hlm. 105).

Sedangkan secara terminologi, para pakar telah memberikan definisi yang beragam, namun secara garis besar dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok definisi; 1) definisi yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan dan keadilan; dan 2) definisi yang dirumuskan berdasarkan sikap sosial yang meliputi penghargaan, pengakuan dan penerimaan atas keberagaman. Pendidikan multikultural dipandang mampu membentuk masyarakat Indonesia memiliki jiwa kebangsaan sehingga dapat menjaga keutuhan nasional dari ancaman perpecahan. Jika nilai-nilai multikultural ini dapat diejawantahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, maka hal itu akan mampu melahirkan peserta didik yang berpaham keagamaan yang moderat, inklusif dan toleran. Upaya membangun masyarakat semacam ini adalah hal yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari banyak etnis dan agama (Marzuki & Miftahuddin, 2011, hlm. 2).

Dalam pandangan Azyumardi Azra, titik tekan multikulturalisme adalah penerimaan terhadap realitas perbedaan dan keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Multikulturalisme bisa juga dimaknai sebagai pandangan dunia yang mengakui segala eksistensi kultural yang ada, terlepas dari besar atau kecilnya; pandangan inilah yang kemudian disebut dengan *politics of recognition* (Azra, 2007, hlm. 13). Multikulturalisme adalah paham yang meyakini bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang berbeda di tengah masyarakat sesungguhnya bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan ditandai oleh sikap saling menghargai satu sama lain. Secara lebih lanjut, dalam pandangan Azra, multikulturalisme bermuara pada satu kesadaran dan penegasan bahwa segala keberagaman dan perbedaan memiliki kedudukan yang sama di ruang publik. Dengan kata lain, multikulturalisme tidak hanya sebatas soal pemahaman akan kemajemukan. Adapun nilai-nilai inti yang dikembangkan dalam multikulturalisme perspektif Azra adalah kesadaran akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*), dan demokrasi (*democratic values*) (Nurhusna, 2014, hlm. 101).

Lahirnya paham multikulturalisme dilatarbelakangi pentingnya pengakuan (*the need of recognition*) terhadap keragaman budaya yang ada di berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Maka paham multikulturalisme ini harus benar-benar dipahami sebagai sebuah konsep besar yang bertujuan untuk mengangkat penghargaan dan spirit kesetaraan semua manusia. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah konsep yang berupaya mengapresiasi keragaman budaya. Dalam konsep multikulturalisme, kesetaraan (*equality*) dan pengakuan (*recognition*) merupakan prinsip yang paling ditekankan. Secara lebih lanjut, multikulturalisme tidak cukup hanya dipahami sebagai pandangan dunia atau konsep semata, namun perlu diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan yang menekankan pentingnya penerimaan terhadap segala perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini multikulturalisme bisa dimaknai sebagai pandangan dunia yang harus diwujudkan dalam kesadaran politik (Azra, 2007, hlm. 16).

Pada sebuah masyarakat multikultural, di dalamnya terdapat berbagai unsur komunitas budaya yang berbeda-beda dengan segala konsepsinya mengenai dunia, sistem nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat dan kebiasaan. Multikulturalisme sangat menentang paham monokulturalisme. Berbeda dengan multikulturalisme, monokulturalisme mengidealkan kesatuan budaya secara normatif serta homogenitas dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, multikulturalisme dan monokulturalisme memiliki asumsi dasar yang sejak awal bertolak belakang, yang satu berusaha menghargai perbedaan sementara yang lainnya berupaya mengeliminir perbedaan (Azra, 2007, hlm. 16).

Pendidikan multikultural menurut Azra adalah pendidikan untuk atau tentang keragaman masyarakat menuju terbentuknya kebersatuan di tengah kebhinnekaan. Konsep pendidikan multikultural Azra ini bertitik tolak dari realita keberagaman bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika (Idris, 2020). Azyumardi Azra meyakini bahwa pendidikan agama berbasis multikultural ini sangat dibutuhkan di lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat secara umum. Karena menurutnya, pendidikan agama yang diberikan di lembaga-lembaga pendidikan sejauh ini belum mampu membentuk sikap keagamaan yang mencerminkan perilaku keimanan dan ketaqwaan seseorang yang hakiki, juga kurang menumbuhkan sikap toleran dalam menyikapi berbagai perbedaan, termasuk perbedaan antar umat beragama (Azra, 2005, hlm. 49).

Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan sejauh ini masih belum menunjukkan peran yang signifikan bila dibandingkan dengan sektor lain, seperti ekonomi, bisnis dan politik. Pusat dinamika kebudayaan saat ini disinyalir tidak lagi berada di dunia pendidikan, melainkan di dunia bisnis dan politik. Dalam kondisi seperti ini maka keberadaan lembaga pendidikan Islam pun tak tertutup kemungkinan akan

termarginalkan. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Akan tetapi besarnya jumlah populasi tersebut tidak berbanding lurus dengan kekuatan dan potensinya dalam percaturan kehidupan masyarakat (Zainuddin, 2004, hlm. v). Kondisi demikian sangat berkaitan erat dengan praktek pendidikan Islam sejauh ini yang lebih mengarah pada fanatisme agama dan ideologi klaim kebenaran (*truth claim*), serta kurang menyentuh dimensi realita kehidupan masyarakat dengan berbagai kebutuhan dan tuntutan. Di samping itu, pendidikan agama belum mampu mengembangkan kesadaran yang positif terhadap realita pluralitas kehidupan beragama masyarakat (Arif, 2008, hlm. 215).

Eksistensi dan keberlangsungan suatu bangsa sangat tergantung pada pendidikan masyarakatnya. Pendidikan tidak sekadar untuk meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik, akan tetapi juga membangun nilai-nilai karakter, moral, dan budaya peserta didik. Membangun potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) menuju terbentuknya manusia seutuhnya merupakan tujuan yang ingin dicapai pendidikan. Pendidikan tidak hanya berperan mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pedoman untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dan karakter mulia, seperti kejujuran, keadilan demokrasi, disiplin, toleran dan saling menghormati. Tugas utama yang dihadapi oleh para pendidik, agamawan dan aktivis sosial di era pluralisme dan multikultural adalah, bagaimana mereka dapat terus melestarikan budaya dan tradisi yang mereka yakini kebenarannya, tetapi pada saat yang sama mereka juga perlu menyadari dan mengakui keberadaan budaya dan tradisi lainnya yang juga melakukan hal yang sama. Mereka harus mampu memperkuat identitas diri dan budaya kelompoknya dengan tetap menjaga kebersamaan dengan kelompok-kelompok yang lain (Abdullah, 2005, hlm. 2-3).

Model pendidikan yang sesuai bagi masa depan Indonesia harus digali berdasarkan realitas sosiologis, antropologis dan teologis masyarakatnya. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibanding bangsa-bangsa lain, karena terdapat berbagai etnik dan kelompok keagamaan yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itu harus disikapi secara positif dan dimanfaatkan dengan baik untuk saling membantu satu sama lain, saling berkompetisi dalam kebaikan, serta saling menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan multikultural sejauh ini dipandang sangat signifikan untuk terus dikembangkan di Indonesia. Pendidikan multikultural merupakan model pendidikan yang diyakini mampu menciptakan perdamaian dalam upaya mengatasi konflik yang marak belakangan ini. Hal ini karena nilai dasar pendidikan multikultural adalah menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi, empati, simpati, solidaritas sosial, saling peduli, menghargai keberagaman dan perbedaan pendapat, dan sikap-sikap lainnya yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, agama, dan lainnya, adalah fakta yang tidak bisa

dibantah. Sehingga karenanya Indonesia disebut bangsa multikultural. Tapi disisi lain, kehidupan multikultural menghadapi tuntutan kebutuhan mendesak untuk membangun kembali budaya nasional Indonesia agar dapat menjadi kekuatan integratif yang mengikat semua keragaman etnis dan budaya yang ada. Maka pendidikan dengan pendekatan multikultural perlu dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan (<https://wewenimas.wordpress.com>, diakses September 2025).

Sederhananya, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman budaya masyarakat di masa lalu dan masa kini yang akan terus mengalami perubahan demografi dan sosial budaya. Dengan upaya pendidikan semacam ini diharapkan akan tumbuh rasa saling pengertian di antara berbagai entitas budaya yang beragam (Azra, 2019a, hlm. 298).

Pendidikan multikultural memandang bahwa problematika yang terjadi di masyarakat pada umumnya bersumber dari munculnya sikap ketidakpedulian dan tidak adanya pengakuan dari satu pihak kepada pihak lain. Situasi ini pada gilirannya akan berdampak munculnya berbagai penyimpangan di masyarakat, dan inilah yang menjadi sorotan atau paradigma pendidikan multikultural. Paradigma ini mendorong tumbuhnya studi-studi tentang etnik, hingga masuk ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan utama diskusi tentang masalah-masalah tersebut adalah untuk pemberdayaan kelompok minoritas dan kelompok yang kurang beruntung (Azra, 2017).

Konsep pendidikan multikultural bisa digunakan baik pada tataran deskriptif maupun normatif, yang di dalamnya menggambarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat multikultural, sekaligus juga mencakup pemahaman tentang pertimbangan kebijakan dan strategi yang tepat untuk praktek pendidikan di tengah masyarakat. Dalam tataran deskriptif dan normatif ini, kurikulum pendidikan multikultural harus mencakup subjek-subjek seperti: toleransi, tema tema tentang etno-budaya, perbedaan keyakinan beragama, bahaya diskriminasi, resolusi dan mediasi konflik, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan secara universal, dan subjek-subjek lainnya (Azra, 2017).

Konsep dan pelaksanaan pendidikan multikultural sejauh ini masih membutuhkan diskusi yang intens dan serius. Ini bukan hanya terkait masalah isi atau konten pendidikan multikultural, tapi juga tentang bagaimana strategi yang dilakukan. Apakah misalnya dalam bentuk subjek yang berdiri sendiri ataukah terpadu dengan subjek-subjek lain. Namun, terlepas dari masalah tersebut, jelas bahwa dinamika bangsa Indonesia sekarang ini memerlukan pendidikan multikultural, yang diharapkan bisa benar-benar memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan kekuatan persatuan di tengah keberagaman masyarakat, tidak cukup hanya sebagai slogan dan jargon. Dan ini, pada gilirannya, akan memperkuat aktualisasi Pancasila

sebagai identitas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan masyarakat multikultural di Indonesia yang sehat tentu bukan hal yang mudah dan instan. Perlu upaya serius yang sistematis, terprogram dan berkelanjutan. Upaya strategis yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah melalui pendidikan multikultural (Azra, 2019a, hlm. 200-201).

B. PEMBAHASAN

Wacana multikulturalisme di Indonesia pada dasarnya bukan sesuatu baru. Sebab, bangsa Indonesia sejak awal sejarahnya telah memiliki beraneka ragam budaya, etnis, ras dan agama sebagaimana tercantum dalam falsafah Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia sejak awal merupakan bangsa multikultural. Namun pada perkembangannya, multikulturalisme menjadi isu yang semakin penting seiring masih sering munculnya berbagai konflik sosial, etnik, dan agama yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya pemahaman secara dewasa terhadap perbedaan menjadi sebuah keniscayaan. Multikulturalisme secara sederhana dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa masyarakat adalah entitas yang sangat beragam dan majemuk. Singkatnya, multikulturalisme merupakan sebuah keyakinan pada normalitas dan penerimaan atas perbedaan (Azra, 1999, hlm. 7).

Parekh (Parekh, 1997, hlm. 183-185), sebagaimana dikomentari oleh Azra, membedakan lima bentuk multikulturalisme. Pembagian kelima bentuk multikulturalisme ini tidak bersifat “kedap air” (*watertight*), akan tetapi bisa tumpang tindih dalam segi-segi tertentu, yaitu:

Pertama, “multikulturalisme isolasionis”. Multikulturalisme bentuk ini merujuk pada kondisi masyarakat dimana berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya dapat hidup secara otonom dan terlibat interaksi satu sama lain secara minimal. Contohnya adalah masyarakat millet di Turki Utsmani atau masyarakat Amish di Amerika Serikat. Masyarakat Samin yang ada di Indonesia juga menganut bentuk multikulturalisme ini. Kelompok masyarakat ini dapat hidup damai dalam keberagaman, tetapi pada saat yang sama juga berusaha tetap menjaga eksistensi budaya mereka secara terpisah dari kelompok lainnya.

Kedua, “multikulturalisme akomodatif”. Pada masyarakat jenis ini terdapat kelompok kultur dominan, namun mereka tetap mengakomodir kebutuhan kelompok kultural kaum minoritas. Dalam multikulturalisme akomodatif biasanya dirumuskan dan diterapkan undang-undang atau hukum yang mengatur hal-hal sensitif secara kultural. Selain itu juga memberikan kebebasan kepada kelompok minoritas untuk melestarikan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kaum kultur dominan. Contoh multikulturalisme bentuk ini bisa ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya.

Ketiga, “multikulturalisme otonomis”. Dalam multikulturalisme bentuk ini setiap kelompok kultural mengidealkan kesetaraan (*equality*) dan kehidupan yang otonom dalam bidang politik, baik bagi kelompok kultur dominan maupun minoritas. Dalam hal ini kelompok kultural minoritas berusaha menjaga cara hidup mereka dan mempunyai hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menentang hegemoni kelompok kultural dominan dan menginginkan terciptanya masyarakat dimana semua kelompok yang ada di dalamnya menjadi mitra sejajar. Multikulturalisme ini sebagaimana diperjuangkan kelompok Quebecois di Kanada dan kelompok-kelompok muslim imigran di Eropa, yang menuntut penerapan syari’ah dan kebebasan mendidik anak-anak mereka di sekolah Islam, dan sebagainya.

Keempat, “multikulturalisme kritikal” atau “interaktif”. Yaitu multikulturalisme yang mengidealkan terciptanya kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok kultur dominan sering kali menolak bentuk multikulturalisme ini, dan berupaya menerapkan kultur dominan mereka secara paksa dengan mengabaikan kultur kelompok minoritas. Hal ini menyebabkan kelompok kultur minoritas kerap mengadakan perlawanan terhadap kelompok kultur dominan, baik secara intelektual maupun politik. Kelompok kultur minoritas menginginkan terwujudnya kultur kolektif baru yang *egaliter*. Contoh multikulturalisme ini sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok kulit hitam di Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain.

Kelima, “multikulturalisme kosmopolitan”. Multikulturalisme bentuk ini berupaya menghilangkan sekat-sekat kultural demi terciptanya tatanan masyarakat baru, dimana setiap orang tidak lagi terikat oleh budaya tertentu, tetapi sebaliknya bisa secara bebas terlibat dalam interaksi interkultural dan sekaligus melestarikan kehidupan kultural masing-masing. Multikulturalisme bentuk ini didukung oleh sebagian besar kaum intelektual diasporik dan kelompok liberal yang memiliki pemahaman *postmodernist* yang memandang semua budaya adalah *resources* yang bisa dipilih dan diambil secara bebas.

Menurut Azra, Indonesia termasuk bentuk multikulturalisme kedua dan keempat. Di Indonesia pada dasarnya terdapat kelompok dominan baik dalam konteks budaya, politik, etnis dan agama; tetapi kelompok dominan tersebut mengakomodir kultur-kultur lain agar bisa mengekspresikan dirinya. Selain itu, di Indonesia juga berlangsung proses interaksi yang cukup intens antara kultur dominan dan kultur-kultur lain, yang pada akhirnya akan melahirkan “*supra kultur*”, yakni kultur *nation-state* Indonesia (Azra, 2007, hlm. 16).

Menurut Heywood, kelima bentuk multikulturalisme di atas merupakan jenis multikulturalisme deskriptif, yang mendeskripsikan realitas multikultural masyarakat. Selain multikulturalisme deskriptif, menurut Heywood ada pula multikulturalisme

normatif, yakni sebuah legitimasi atas keragaman masyarakat yang didasarkan atas hak setiap kelompok yang berbeda untuk dihargai dan diakui keberadaannya. Multikulturalisme normatif ini membutuhkan peran dan keterlibatan pemerintah yang secara sadar, terarah, dan terencana berupaya mewujudkan multikulturalisme melalui kebijakan-kebijakannya (Heywood, 2007, hlm. 313).

Menurut Bunnet, sebagaimana juga ditulis oleh Azyumardi Azra, pendidikan multikultural memiliki tiga macam program yang dapat diterapkan oleh sekolah dan masyarakat secara keseluruhan (Azra, 2003, hlm. 2).

Pertama, program yang berorientasi pada materi (*content oriented programs*) yang merupakan bentuk pendidikan multikultural yang paling umum dapat cepat dipahami. Tujuan utamanya adalah memasukan materi tentang kelompok budaya yang berbeda ke dalam kurikulum dan materi pendidikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan peserta didik mengenai kelompok-kelompok ini. Dalam bentuk yang paling sederhana, program ini menambahkan aspek multikultural ke dalam kurikulum yang standar. Versi yang lebih canggih dari bentuk ini yaitu: a) mengembangkan muatan multikultural melalui berbagai disiplin ilmu. b) memasukan sejenis sudut pandang dan perspektif yang berbeda dalam kurikulum. c) mengubah aturan yang pada akhirnya mengembangkan paradigma baru bagi kurikulum.

Kedua, program yang berorientasi pada peserta didik (*student oriented programs*) dalam rangka untuk meningkatkan prestasi akademik kelompok peserta didik yang berbeda, tanpa memberikan perubahan besar dalam muatan kurikulum. Program ini tidak dirancang untuk mengubah kurikulum atau konteks sosial pendidikan, melainkan membantu peserta didik dengan budaya dan bahasa yang berbeda untuk menciptakan perubahan dalam *mainstream* pendidikan. Dalam hal ini terdapat beberapa kategori program yang khas, yaitu: a) Program yang menggunakan riset dalam model belajar yang berbasis budaya. b) Program dua bahasa atau dua budaya. c) Program bahasa yang mengandalkan bahasa dan budaya sekelompok peserta didik minoritas.

Ketiga, program yang berorientasi sosial (*socially oriented programs*). Program ini berupaya mereformasi pendidikan maupun konteks politik dan budaya pendidikan, yang tujuannya bukan untuk meningkatkan prestasi akademik atau menambah sekumpulan pengetahuan multikultural, melainkan untuk meningkatkan toleransi budaya, ras, serta mengurangi bias. Program ini tidak hanya meliputi program yang dirancang untuk merestrukturisasi sekolah, tetapi juga untuk meningkatkan semua bentuk hubungan di kalangan kelompok etnik dan ras dalam program belajar bersama, tanpa membedakan perbedaan yang ada pada setiap individu.

Pendidikan multikultural dapat dimaknai sebagai pendidikan tentang keragaman budaya dalam merespon perkembangan demografi dan budaya masyarakat di wilayah

tertentu bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini selaras dengan pendapat Paolu Freire yang menyatakan bahwa pendidikan bukan “menara gading” yang menjauhi realitas sosial dan budaya. Akan tetapi pendidikan harus mewujudkan tatanan masyarakat yang tidak hanya mengagungkan prestise-prestise sosial menyangkut capaian kekayaan dan kemakmuran yang diraih. Melalui pendidikan multikultural ini diharapkan akan terwujud suatu tatanan masyarakat yang damai, harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam upaya memahami perspektif dan implementasi pendidikan multikultural, maka perlu pemahaman tentang hakekat dan nilai-nilai dasar multikulturalisme, yaitu: a) *al-Ukhuwah*, Persaudaraan. b) *al-Hurriyah*, Kebebasan. c) *al-Musawah*, Kesetaraan. d) *al-'Adalah*, Keadilan (Azra, 2003, hlm. 2).

Poin-poin di atas selaras dengan kajian James Banks tentang konsep pendidikan multikultural. Banks menyatakan bahwa pendidikan multikultural mempunyai lima dimensi yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: 1. *Content integrations in instructional*, yakni mengintegrasikan keragaman budaya dan kelompok masyarakat ke dalam setiap mata pelajaran atau disiplin ilmu, 2. *The knowledge construction process in instructional*, yakni mengarahkan peserta didik agar memahami implikasi budaya dalam sebuah mata pelajaran. 3. *An equity paedagogy in instructional*, yakni mengembangkan metode pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan prestasi peserta didik yang beragam, baik dari segi ras, budaya, maupun sosial, 4. *Training participation in instructional*, yakni melatih setiap kelompok untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh civitas pendidikan yang berbeda etnis, ras dan agamanya dalam rangka menciptakan budaya akademik yang multikultur, 5. *Prejudice reduction in instructional*, yakni mengenali perbedaan karakteristik peserta didik dan memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mereka (Banks, 2004, hlm. 192).

Wacana tentang pendidikan multikultural semakin meningkat seiring berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berimplikasi pada menguatnya peran masyarakat sipil (*civil society*) dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi yang saat ini menjadi pilihan masyarakat global dalam sistem kehidupan berbangsa telah melahirkan sprit persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh di tengah keberagaman, serta hilangnya hambatan budaya, ras, bahasa dan agama demi kepentingan masa depan bangsa yang semakin kompetitif dalam menghadapi persaingan global (Rosyada, 2014, hlm. 1-2).

Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Karenanya, Indonesia bisa dikatakan sebagai masyarakat multikultural. Tapi di sisi lain, kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kepentingan yang mendesak untuk merekonstruksi budaya nasional yang dapat menjadi kekuatan integratif yang mengikat semua perbedaan etnis dan budaya. Oleh karenanya dibutuhkan sikap terbuka dari masing-masing kelompok untuk menyatukan keragaman budaya yang dimiliki. Sehingga dari sini akan terjadi proses "hidridasi"

yang meminta semua orang untuk tidak menekankan perbedaan dalam budayanya masing-masing (Ramly, 2005, hlm. xv).

Masalah utama yang dihadapi oleh pendidik dan aktivis sosial agama dalam era pluralistik dan multikultural adalah bagaimana setiap tradisi religius dapat terus lestari dan berkembang secara turun temurun sebagai sebuah kepercayaan yang diyakini absolut oleh kelompoknya, namun pada saat yang sama juga mereka bisa memahami adanya kelompok tradisi religius lainnya yang juga memiliki keyakinan yang sama. Ini tentu membutuhkan proses panjang, kedewasaan sikap hingga pengorbanan (Abdullah, 2005, hlm. 3).

Pendidikan multikultural merupakan alternatif pendekatan yang cukup progresif untuk mengubah wajah pendidikan di Indonesia yang sejauh ini dianggap kurang berhasil dan diskriminatif. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan tentang keadilan sosial dan kesamaan hak dalam pendidikan. Pendidikan multikultural adalah komitmen untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan setiap peserta didik dapat mengembangkan potensinya sebagai individu yang aktif sekaligus memiliki sensitivitas sosial (Budianta, 2003). Tujuan utama pendidikan multikultural adalah meningkatkan kesadaran peserta didik untuk berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis dalam mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat (Masamah & Huda, 2016, hlm. 73).

Pendidikan multikultural setidaknya meliputi tiga dimensi, yaitu: gagasan; gerakan; dan proses. Pendidikan multikultural memandang bahwa semua peserta didik, apapun jenis kelamin, kelas sosial, dan karakteristiknya, harus mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dalam pendidikan multikultural, diskriminasi merupakan masalah utama yang menjadi latar belakang pentingnya penerapan strategi pendidikan. Diharapkan dengan menerapkan strategi pendidikan ini, generasi mendatang akan tumbuh menjadi generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi dan kemanusiaan (Banks & Banks, 2010, hlm. 3).

Sleeter dan Grant menyatakan, bahwa pendekatan paling utama dalam pendidikan multikultural bukanlah melalui retorika atau ceramah secara verbal, akan tetapi dengan perilaku-perilaku yang lebih nyata dan langsung. Tidak sekadar teoritis, akan tetapi terpadu secara implementatif dalam pembelajaran. Di antara pendekatan dan tema yang bisa dilakukan adalah melalui pembelajaran tentang perbedaan budaya, hubungan kemanusiaan, kelompok-kelompok belajar, pendidikan tentang pluralitas budaya, multikultural dan rekonstruksi sosial. Hal-hal tersebut perlu diatur dalam sebuah kurikulum yang sistematis (Yeo, 1997, hlm. 116).

Pendidikan multikultural merupakan model pendidikan yang mengusung ideologi yang menghargai harkat dan martabat manusia, di manapun dan kapanpun,

baik dalam konteks ekonomi, sosial, budaya, bahasa, etika, agama maupun negara (Julaiha, 2014, hlm. 113). Paulo Freire berpandangan, pendidikan bukan menara gading yang menjauh dari realita sosial dan budaya. Menurutnya, pendidikan harus mampu menciptakan masyarakat terdidik, bukan masyarakat yang hanya mengagungkan gengsi sosial semata. Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman masyarakat dan lembaga pendidikan, dalam rangka memenuhi tuntutan persamaan hak bagi semua kelompok. Secara garis besar, pendidikan multikultural melayani kepentingan seluruh peserta didik tanpa membedakan kelompok (Freire, 1984, hlm. 4). Tilaar mengungkapkan, bahwa fokus pendidikan multikultural tidak semata-mata diarahkan pada domain agama dan budaya arus utama (mayoritas), akan tetapi lebih menekankan pada peningkatan pemahaman dan toleransi antar kelompok serta sikap peduli dan pengakuan terhadap kelompok lain. Pendidikan multikultural adalah cara untuk mengajarkan keberagaman (Tilaar, 2002, hlm. 59).

Tujuan pendidikan multikultural adalah membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketergantungan dan ketertindasan dalam hubungan agama, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Pendidikan multikultural ini harus mulai diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional dan diajarkan sejak jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Idris, 2020b, hlm. 22). Secara umum, pendidikan multikultural berupaya menghilangkan egoistis, individualistis dan sikap eksklusif peserta didik. Sebaliknya, pendidikan multikultural berupaya menumbuhkembangkan paradigma peserta didik yang dapat menghargai keberadaan orang lain, serta menyadari bahwa keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari realita kehidupan yang penuh keberagaman. Oleh karenanya, pendidikan multikultural sangat erat kaitannya dengan penguatan karakter bangsa yang perlu diimplementasikan dalam kurikulum secara integratif, baik materi maupun proses pembelajarannya (Subandi et al., 2019, hlm. 249-250).

KESIMPULAN

Dalam pandangan Azra, multikulturalisme bermuara pada satu kesadaran dan penegasan bahwa segala keberagaman dan perbedaan memiliki kedudukan yang sama di ruang publik. Multikulturalisme tidak hanya sebatas pemahaman akan adanya kemajemukan. Adapun nilai-nilai inti yang dikembangkan dalam multikulturalisme perspektif Azra adalah kesadaran akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*), dan demokrasi (*democratic values*). Pendidikan multikultural menurut Azra adalah pendidikan untuk atau tentang keragaman masyarakat menuju terbentuknya kebersatuan di tengah kebhinnekaan. Konsep pendidikan multikultural Azra ini bertitik tolak dari realita keberagaman bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural – Multi Religius* (Jakarta: PSAP, 2005).
- Aly, Abdullah, *Model Kurikulum Pendidikan Islam Multikultural di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2012).
- Arif, Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LkiS, 2008).
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994).
- _____, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- _____, “Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia”, Tahun 2007 (<http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20azyumardi%20azra.htm>), diakses 12 Juni 2021.
- _____, "Pendidikan Agama: Membangun Multikulturalisme Indonesia" dalam Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2003).
- _____, *Dari Harvard Hingga Mekkah* (Jakarta: Penerbit Republika, 2005).
- _____, “Revitalisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Pendidikan Multikultural”, dalam *Jurnal Ledalero*, Vol. 18, No. 2, 2019.
- _____, “Revitalisasi Wawasan Kebangsaan: Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika Pendekatan Pendidikan Multikultural” (Makalah “Penguatan Nilai Kebangsaan Guna Merajut Kebhinnekaan dalam Rangka Ketahanan Nasional”, PPRA Lemhanas LVI 2017).
- Baidhawi, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Banks, James A., *An Introduction to Multicultural Education* (Boston-London: Allyn and Bacon Press, 2004).
- _____, and Cherry A Mcgee Banks (ed.), *Multicultural Education Issues and Perspective* (The United States of America, 2010).
- Budianta, Melani, “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gagasan Umum”, dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 1, No. 2, 2003.
- Fadjar, A. Malik, “Strategi Pengembangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi”, dalam M. Zainuddin dan Muhammad In’am Esa (ed.), *Horison Baru Pengembangan Pendidikan Islam Upaya Merespon Dinamika Masyarakat Global* (Malang: UIN Press, 2004).
- Freire, Paulo, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, terj. Alois A. Nugroho (Jakarta: Gramedia, 1984).
- Heywood, Andrew, *Political Ideologies* (Palgrave: McMillan, 2007).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Azyumardi_Azra.
- Idris, Muh., “Azyumardi Azra’s Thought on Multicultural Education”, *Jurnal Miqot*, UIN Sumatera Utara, Vol. 44 No. 1 Januari-Juni 2020 (<http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v44i1.739>).
- _____, dkk., “Peace Resolution in Education and Application on Information and Communication Technology”, dalam *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 6, 2020.
- _____, *Orientasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020).

- Julaiha, Siti, "Internalisasi Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Dinamika Ilmu*, Vol. 14, No. 1, Juni 2014.
- Ma'arif, Syamsul, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005).
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Marzuki, M.M. dan Miftahuddin., "Tipologi Perubahan dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf", *Laporan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta: 2011).
- Marzuki, dkk., "Multicultural Education in Salaf Pesantren and Prevention of Religious Radicalisme in Indonesia", dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Vol. 39, No. 1, Februari 2020.
- Masamah, Ulfa, dan Muallimul Huda, "Multicultural Education and The Nationalistic Reality (Photograph The Role of Teachers in Building a Multicultural Awareness in Indonesia)", dalam *Jurnal QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1, Februari 2016.
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran, 2020).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007).
- Nurhusna, Lu'lu, "Multikulturalisme Azyumardi Azra dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam" (Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).
- Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik* (Yogyakarta: Impulse dan Kanisius, 2008).
- _____, "National Culture and Multikulturalism", dalam Thompson, Kenneth (ed) *Media and Kultural Regulation* (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 1997).
- "Pendidikan Multikultural Membangun Kembali Indonesia Bhinneka Tunggal Ika", dalam <https://wewenimas.wordpress.com>, diakses 14 Juni 2021.
- Rosyada, Dede, "Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional", dalam *Sosio Didaktika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 1 Juni 2014.
- Ramly, Najmuddin, *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005).
- Subandi, dkk., "Implementation of Multikultural and Moderate Islamic Education at the Elementary School in Shaping the Nationalisme", dalam *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Thompson, Kenneth (ed) *Media and Kultural Regulation* (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 1997).
- Tilaar, H.A.R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2002).
- Yeo, Frederick L, *Inner-City School, Multiculturalism and Teacher Education A. Proffessional Journey* (New York and London: Garland Publishing, Inc, 1997).
- Zainuddin, M. (ed.), *Memadu Sains dan Agama Menuju Universitas Islam Masa Depan* (Malang: Bayu Media Publishing, 2004).